

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Diah, Marwah M., 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi?*, Literata Lintas Media, Jakarta
- Fuady, Munir, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Griffin, W. Ricky, 1990, *Management*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Hatta, Mohammad, 2000, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2: Kemerdekaan dan Demokrasi*, Penerjemah: Sugiarta Sriwibawa, LPES, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2009, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mangkosoebroto, Guritno, 1996, *Ekonomi Publik*, LBPFE, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nursadi, Harsanto, 2016, *Hukum Administrasi Negara Sektor*al, Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan, Depok.

Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta.

Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, Jakarta.

Saleg, Abrar, 2007, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta

Salim, HS, 2006, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta

S.W. Sumardjono, Maria, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

----- dan Mamudji, Sri, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Soerodjo, Irawan, 2016, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

-----, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Swasono, Sri Edi, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 2010, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Yayasan Hatta, Jakarta.

Tribowo, Darmawan dan Sugeng, Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Utrecht, Ernest, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*.

Van Apeldoorn, 1980, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, terj. Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Wiratno, R., dkk, 1958, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Artikel Jurnal:

Abdi, Jusra, 2009, *Tinjauan Hukum Terhadap Power Purchase Agreement (PPA) Antara PT Paiton Energy Company dengan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN)*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ansari, Muhammad, “BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 44, No. 1, Maret 2017.

Kristiyani, Rita, 2014, *Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Listrik di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Lestari, Esta, “Tinjauan Kritis Atas Model Pembiayaan dan Penjaminan Dalam KPS Kelistrikan”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 1, 2016.

Mercy M. M. Setlihgt, “Karakteristik Perjanjian Bangun Guna Serah”, *Lex et Societa*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2013.

Rifai, Bachtiar, “Kendala Implementasi Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Kelistrikan dan Kebutuhan Perbaikan Kebijakan”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 24, No. 1, 2016.

Paryono, “Politik Hukum Industri Ketenagalistrikan Berbasis Nilai-Nilai Transendental,” *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, April 2018.

Sobirin, Achmand, “Privatisasi: Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku Karyawan dan Budaya Organisasi,” *Jurnal Siasat Bisnis*, Edisi Khusus Sumber Daya Manusia, Tahun 2005

Sukmana, Oman, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2016, hlm. 105.

Sutiyoso, Bambang, “Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2, April 2013, hlm. 213-214

Tarigan, P. Jefri, “Inkonstitusionalitas Sistem *Unbundling* dalam Usaha Penyediaan Listrik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018.

Yurista, Ananda, “Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 3, Desember Tahun 2017

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Akbiyikli, R. dan D. Eaton., *A Comparison of PFI, BOT, BOO, and BOOT Procurement Routes For Infrastructure Construction Projects*, Research Institute for Built and Human Environment, University of Salford.

Bakhteyari, Karim, 2007, *Public Private Partnership as a Public Infrastructure Optimizer*, Diploma Work in collaboration with Nottingham Trent University, Malardalen University, Department of Public Technology.

Bashiri, Marjan, Dkk, 2011, “*Analytical Comparison Between BOT, BOOT, and PPP Project Delivery Systems*”, Paper Konferensi, 6th International Project Management Conference, Tehran, Iran.

Donaghue, Brian, 2002, *Statistical Treatment of Build-Own-Operate-Transfer Schemes*, International Monetary Fund Working Paper, WP/02/167.

Nizammudin, 2003, *Aspek Hukum Kontrak Yang Mengandung Klausula Take of Pay Menurut Hukum Perjanjian Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Power Purchase Agreement Antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan PT Paiton Energy Company*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Rahmawati, Farida, 2010, *Identifikasi Faktor Penentu Keberhasilan dan Risiko Public Private Partnership pada Proyek Gedung di Surabaya*, Konferensi Nasional Teknik Sipil 4, Universitas Udayana-Universitas Pelita Harapan Jakarta-Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sanur, Bali, 2-3 Juni 2010.

Setiawan, Heru, 2011, *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan*, Tesis, Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Suharto, Sri Maemumah, 1996, *Pengelompokan BUMN dalam Rangka Penyusunan Tolok Ukur pada Evaluasi Kinerja di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet

Anindarini, Grita dan Margaretha, Quina, 2018, *Mengenal Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia*, Indonesian Center for Environmental Law, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Brief-ICEL->

[Mengenai-Ketenagalistrikan-di-Indonesia-Rev-EYD-1.pdf](#), diakses tanggal 9 April 2019.

Ashar, Syamsul, “Membagi megaprojek listrik 35.000 MW ke swasta”, <https://industri.kontan.co.id/news/membagi-megaprojek-listrik-35000-mw-ke-swasta>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

Futurum, Corporate Finance Strategists, *Pengenalan Project Finance*, <https://futurumcorfinan.com/article-video/futurum-pengenalan-project-finance-bagian-1/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2019

Prakoso, R., “Kontrak Pembangkit Listrik Wajib Terapkan Skema BOOT”, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/412443-kontrak-pembangkit-listrik-wajib-terapkan-skema-boot.html>, diakses tanggal 7 September 2018.

“Proyek 35.000 MW”, <http://www.bumn.go.id/pln/halaman/121>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

Santosa, Uji Agung, “DEN: Program 35.000 MW tingkatkan porsi swasta”, <https://nasional.kontan.co.id/news/den-35000-mw-harus-tingkatkan-porsi-swasta>, diakses tanggal 25 November 2018.

www.hukumonline.com, “SP PLN Persoalkan UU Ketenagalistrikan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561b7f073b4b0/sp-pln-persoalkan-uu-ketenagalistrikan>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 Nomor 3317)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 49).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1106).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107).

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2028

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 2009, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 15 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Maret 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Desember 2016.

Lain-lain

Bieker, Neil dan Cassie, Boogs, 1997, *Foreign Investment in Privatised Infrastructure Project*, Hadinoto, Hadiputranto & Partner, Jakarta.

David M. Van Slyke, 2013, *Building Public-Private Partnerships*, Presentation to National League of Cities Annual Conference, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University.

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0527.K/DIR/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero)

Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0010.E/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Power Purchase Agreement Pembangkit Listrik Tenaga Air Poso, tanggal 16 November 2017

Power Purchase Agreement PLTU Kalbar-1, tanggal 8 April 2016